

	News Title : Perlindungan Konsumen Diperketat	
	Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Lorenzo A Mahardhika, Sri Mas Sari
	Publish Date : 06 July 2022	Tonality : Positive
	News Page : 3	News Value : 544,500,000
	Resources : Tharman Shanmugaratnam (Ketua MAS), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Sutopo Widodo (Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka)	Ads Value : 181,500,000
	Section/Rubrication : Editors Choices	Topic : kripto

| GEJOLAK PASAR KRIPTO |

PERLINDUNGAN KONSUMEN DIPERKETAT

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah negara tengah mempertimbangkan aturan perlindungan konsumen yang lebih ketat setelah kejatuhan harga aset kripto. Sementara itu, pemerintah RI menggagas adanya *rating* risiko produk kripto sebagai referensi bagi otoritas pasar untuk memberikan atau tidak memberikan izin bagi *listing* produk kripto di bursa dalam negeri.

Lorenzo A. Mahardhika & Sri Mas Sari
redaksi@bisnis.com

U paya terhadap perlindungan konsumen seiring dengan volatilitas harga aset kripto salah satunya dilakukan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS).

MAS sedang mempertimbangkan regulasi perlindungan konsumen tambahan setelah kemerosotan harga aset digital itu memicu serangkaian ledakan kripto profil tinggi, termasuk perusahaan yang berbasis di negara itu.

"Otoritas Moneter Singapura dengan hati-hati mempertimbangkan pengenaan perlindungan konsumen tambahan," ujar Ketua MAS Tharman Shanmugaratnam dalam tanggapan tertulis kepada parlemen yang dikutip Bloomberg, Selasa (5/7).

Dia melanjutkan, regulasi baru itu mungkin akan berupa batasan partisipasi ritel dan aturan tentang penggunaan pinjaman (*leverage*) saat bertransaksi kripto.

Bank sentral Singapura itu sebelumnya berulang kali mengatakan bahwa kripto bukan untuk investor ritel karena aksi jual pasar senilai US\$2 triliun telah menelan daftar pemain yang terus bertambah.

Terraform Labs, yang stablecoin TerraUSD-nya meledak pada Mei, berbasis di Singapura. Demikian pula Three Arrows Capital, dana

tecermin dari kebijakannya yang hanya memberikan izin kepada 14 perusahaan untuk menyediakan layanan pembayaran token digital secara lokal alias hanya sedikit dari sekitar 200 perusahaan yang mengajukan.

Di sisi lain, token virtual terbesar Bitcoin telah jatuh sekitar 56% sepanjang tahun berjalan, terutama karena pengetatan kebijakan moneter global yang membuat aset berisiko kurang menarik. Bitcoin diperdagangkan sekitar US\$19.740 atau turun hampir 1% secara harian.

Kondisi pasar aset kripto yang volatil dan berisiko juga diamini oleh Financial Stability Board (FSB). FSB menyatakan aset kripto sangat rentan karena tingkat *leverage* yang tinggi, operasi dan teknologi yang tinggi dengan kelas aset lain.

Di Indonesia, untuk memberikan perlindungan pada konsumen, Badan Kebijakan Fiskal menggagas agar *rating* risiko produk kripto dapat dijadikan referensi bagi otoritas pasar untuk memberikan atau tidak memberikan izin bagi *listing* suatu produk kripto di bursa dalam negeri. Bursa kripto saat ini masih dalam persiapan.

Standar *rating* kripto meliputi beberapa indikator. *Pertama*, indeks risiko yang meliputi volatilitas harga atau selisih harga terendah dan tertinggi dalam suatu periode.

Kedua, indeks teknologi yang mengukur kapasitas dan kemampuan suatu produk kripto, termasuk kecepatan dan biaya transaksi, skalabilitas, serta kompatibilitas dengan jaringan *blockchain* lain.

Ketiga, indeks peneri-

maan pasar yang mengukur sejauh mana produk kripto dimanfaatkan pasar sebagai instrumen tukar.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengatakan instansinya akan membahas usulan tersebut secara komprehensif dengan BKF. "Akan kami diskusikan dengan BKF ke depannya karena kami belum mengikutu pembahasannya," ujarnya.

MEMBANTU INVESTOR

Secara terpisah, Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menyambut positif usulan pemberian *rating* untuk aset kripto.

Menurutnya, hal ini akan banyak membantu investor awam dalam menganalisis aset-aset kripto yang ada. "Investor juga bisa memilih aset kripto yang sesuai dengan profil risikonya serta kebutuhannya," jelasnya.

Selain itu, upaya mengendalikan volatilitas di pasar kripto sudah dilakukan, tetapi belum paripurna. Badan Kebijakan Fiskal dalam laporan minggunya menyebutkan upaya itu dilakukan dengan berbagai langkah.

Pertama, melakukan seleksi atas mata uang kripto yang diperdagangkan di bursa atau pedagang kripto yang terdaftar.

Kedua, memberikan aturan yang jelas pada bursa terkait dengan batasan perdagangan (batasan beli dan jual) serta pemberlakuan pembekuan perdagangan.

Ketiga, mewajibkan adanya instrumen atau mekanisme lindung

“Akan kami diskusikan dengan BKF ke depannya karena kami belum mengikutu pembahasannya.”

nilai (*safeguard*) bagi *developer* dan penerbit mata uang kripto.

Keempat, pengenaan pajak kripto, yang selain dapat meningkatkan penerimaan negara dari perdagangan kripto di pasar nasional, juga dapat menciptakan biaya tambahan.

Meski dapat mengurangi *spread* yang dapat diperoleh dari suatu transaksi, pengenaan pajak kripto dapat mengurangi intensitas gejolak harga mengingat para pedagang harus menunggu kenaikan harga yang lebih tinggi untuk mendapat selisih keuntungan yang diharapkan.

Dari keempat upaya itu, baru upaya pertama dan keempat yang telah dieksekusi.

Sementara itu

di tengah kondisi pasar kripto yang sedang dalam tren *bearish*, dengan beberapa bursa kripto di luar negeri bahkan dikabarkan berguguran, Bappebti tetap menargetkan bursa kripto Indonesia dapat diluncurkan tahun ini.

Menurut Tirta, ekosistem bursa kripto yang dimaksud dalam peraturan Bappebti akan berbeda dengan bursa kripto luar negeri.

Dia menjelaskan bursa kripto Indonesia akan mencakup sejumlah pelaku, termasuk kustodian dan klining.

"Hal ini berbeda dengan bursa kripto luar negeri yang bangkrut, sebenarnya mereka hanya pedagang kalau di ekosistem *existing* perdagangan kripto yang diatur di Indonesia," katanya.

Mengenai progres pembentukan bursa, Bappebti telah menerima jawaban kesiapan dari calon bursa kripto.

Institusi di bawah Kementerian Perdagangan itu akan melakukan pengecekan kembali sistem platform calon bursa tersebut.

"Hal ini untuk memastikan kesiapan sistem di bursa yang terintegrasi dengan ekosistem lainnya, seperti klining, kustodian, dan para pedagang," ujar Tirta.

Selain itu, Bappebti tengah menunggu progres lainnya, seperti calon klining dan kustodian untuk bursa kripto. Sejauh ini proses tersebut belum masuk ke tahap finalisasi. ■

